

**STATUS PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN SECARA  
AGAMA KATOLIK TANPA ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN  
PERTAMA SECARA KATOLIK AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

Nama : Xerxes Elika Da Conceicao Silva  
Jurusan/ Program Studi : Fakultas Hukum/ Peminatan Keperdataan  
Pembimbing : Prof.Dr. Lanny Kusumawati S.H.,M.Hum  
Irta Syahrial S.H.,M.H

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh hukum negara yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dalam peraturan per-Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan Nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip eksistensi perkawinan tersebut mengikuti hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Alasan penulisan skripsi ini karena penulis tertarik pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang selalu membicarakan kembali pada hukum agama dan kepercayaan tetapi seringkali agama menjadi kendala. Perkawinan secara agama Katolik merupakan aturan ketat diantara agama lain, terutama karena perkawinan katolik tidak mengenal kata perceraian (*Indissolubilitas*). Terkait hal ini maka perkawinan kedua menjadi sulit dilaksanakan karena harus melakukan pembatalan perkawinan. Anulasi atau proses pembatalan perkawinan cukup memakan waktu dan proses yang panjang juga sulit, tetapi tanpa adanya anulasi maka Perkawinan Kedua tidak dapat dikatakan sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian Hukum Normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-*Preskriptif* yang bertujuan menemukan solusi permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normative dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dalam negara Indonesia sudah diatur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan (UUP) pada pasal 2 disebutkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, jadi saya kembalikan pada agama yang diyakini dalam hal ini Perkawinan Katolik. Menunjukkan hasil bahwa status perkawinan katolik yang kedua dinyatakan tidak sah tanpa adanya pembatalan (anulasi) dari perkawinan pertamanya.

Kata kunci: Perkawinan Katolik, Perkawinan Kedua, Pembatalan perkawinan

**THE STATUS OF THE SECOND MARRIAGE PERFORMED IN  
CATHOLIC RELIGION WITHOUT THE CATHOLIC CANCELLATION  
OF THE FIRST MARRIAGE DUE TO DIVORCE REVIEW OF LAW  
NUMBER 1 YEAR 1974  
ABOUT MARRIAGE**

Name : Xerxes Elika Da Conceicao Silva  
Department/ Study Program : Faculty of Law/ Civil Service  
Supervisor : Prof.Dr. Lanny Kusumawati S.H.,M.Hum  
Irtta Syahrial S.H.,M.H

**ABSTRACT**

Marriage is a relationship between a man and a woman that is legally recognized by state law based on applicable marriage regulations. In the regulations of the Marriage Law (UUP) in Indonesia, marriage registration is one of the principles of national marriage law which is sourced from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The principle of the existence of the marriage follows the law of his religion or religious belief, as well as a condition for the validity of a marriage. The reason for writing this thesis is because the author is interested in the Marriage Law (UUP) which always talks back to religious law and belief but is often an obstacle. Catholic marriage is a strict rule among other religions, especially because Catholic marriage does not recognize the word divorce (Indissolubility). Related to this, the second marriage becomes difficult to carry out because it has to cancel the marriage. The annulment or the marriage process is quite time-consuming and a long process is also difficult, but without annulment, the second marriage cannot be said to be valid. The research method used in this research is to use the normative law research method. As a normative legal research, this research belongs to the category of descriptive-prescriptive legal research which aims to find solutions to problems. The approach used in this research is a normative juridical approach, which is an approach that examines normative and doctrinal legal principles. The results of the study indicate that a marriage within the Indonesian state has been regulated in accordance with the Marriage Law (UUP) in article 2 which is stated in accordance with the law of religion and belief, so we return to the religion that is believed in this case Catholic marriage. The result of the second Catholic marriage is declared invalid without the annulment of the first marriage.

Keywords: Catholic marriage, second marriage, marriage annulment